

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Entitas nirlaba secara masif telah berkembang dengan sedemikian rupa di era modern ini. Entitas nirlaba merupakan organisasi yang dalam proses aktivitasnya melayani kepentingan masyarakat secara sosial, dengan tujuan mensejahterakan masyarakat serta tidak mengharapkan keuntungan. Nainggolan (2005) menyatakan bahwa, organisasi nirlaba merupakan suatu lembaga atau kumpulan dari beberapa individu yang memiliki tujuan tertentu dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tadi, dalam pelaksanaan kegiatan yang mereka lakukan tidak berorientasi pada pemupukan laba atau kekayaan semata

Karakteristik yang membedakan entitas nirlaba dengan entitas lainnya adalah adanya transaksi-transaksi tertentu yang tidak terjadi dalam entitas lainnya, yaitu adanya pengakuan penerimaan sumbangan (sumbangan terikat serta sumbangan tidak terikat). Menurut PSAK No.45 bahwa “organisasi nirlaba memperoleh sumber daya dari sumbangan para anggota dan para penyumbang lain yang tidak mengharapkan imbalan apapun dari organisasi tersebut”. (IAI, 2017: 45.1).

Dengan perbedaan sifat tersebut, Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) mengatur tentang bagaimana perlakuan penyajian laporan keuangan diantara entitas nirlaba maupun non-nirlaba melalui Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Seperti halnya organisasi bisnis, entitas nirlaba diatur dalam PSAK No. 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba. Laporan keuangan entitas nirlaba dalam

PSAK No. 45 terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan. Penyajian laporan entitas ini diharapkan menjadi bentuk akuntabilitas serta transparansi sebuah entitas kepada pihak luar entitas.

Kesuksesan sebuah entitas dapat dinilai dari keberhasilan dalam menyusun laporan keuangan yang dilakukan. Selain sebagai bentuk keberhasilan juga sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada para pemegang saham serta pemangku kepentingan dalam sebuah entitas. Penyusunan laporan keuangan seringkali dimaksudkan untuk memberikan informasi tentang proses bisnis maupun non bisnis sebuah entitas.

Perbedaan penyajian laporan keuangan dalam PSAK seringkali tidak sepenuhnya diketahui oleh entitas nirlaba maupun organisasi bisnis. Sehingga dalam penyusunannya tidak sesuai dengan standar keuangan yang berlaku umum. Banyaknya aktivitas entitas dalam prakteknya lebih memfokuskan pengembangan program-program yang dimiliki, sehingga melupakan pentingnya keberhasilan dalam penyusunan keuangan yang taat administratif. Dengan tidak taatnya melakukan penyajian administratif keuangan yang benar, laporan keuangan yang disusun pun menimbulkan interpretasi yang berbeda tentang laporan keuangan yang telah disusun. Akibatnya, pihak eksternal tidak dapat membedakan bagaimana perlakuan laporan keuangan antara entitas yang berbeda tersebut.

Secara umum perbedaan yang paling mendasar terletak pada laporan posisi keuangan pada entitas nirlaba serta laporan neraca pada organisasi bisnis. Yaitu

terdapat pada akun “ekuitas” pada neraca, yang disebut dengan “aktiva bersih” pada laporan posisi keuangan. Kurangnya pengetahuan tentang hal ini, membuat beberapa entitas nirlaba menyusun laporan keuangannya berdasarkan penyajian laporan keuangan menurut organisasi bisnis. Akibatnya, tujuan utama entitas nirlaba dalam menerapkan transparansi laporan keuangan kurang maksimal, juga memberikan dampak dalam akuntabilitas sebuah entitas terhadap pengakuan dari pihak eksternal.

Menurut PSAK No.45 sebuah entitas nirlaba terdiri dari organisasi keagamaan, rumah sakit, sekolah negeri, museum, yayasan serta jasa sukarewan. Sebagai salah satu entitas nirlaba, gereja memiliki hak dan kewajiban dalam menyajikan laporan keuangan kepada seluruh jemaat gereja hingga Dewan Majelis Gereja. Hal ini harus dilakukan untuk memberikan kepuasan kepada jemaat serta pihak donatur atas sumbangan yang diberikan. Dana yang didapatkan dari jemaat memiliki peran yang cukup kuat untuk menopang setiap pelayanan gereja kepada jemaat. Dana yang diterima tersebut digunakan juga dalam mengembangkan infrastruktur gereja, melalui perluasan tempat ibadah, perlengkapan gereja, serta aset-aset yang dapat menunjang pelayanan gereja.

Dengan banyaknya jumlah dana yang diterima gereja, seringkali menjadi tempat adanya praktek penyalahgunaan dana, baik dengan sengaja dilakukan maupun tidak sengaja dilakukan oleh pihak-pihak gereja yang berkepentingan. Penyalahgunaan dana melalui jabatan yang dimiliki seseorang terjadi karena kurangnya pengendalian internal. Pengendalian yang dapat dilakukan oleh gereja adalah melakukan pencatatan setiap transaksi yang terjadi hingga melakukan

pembukuan dan pelaporan sebagaimana telah dianjurkan dalam PSAK. Dengan adanya pencatatan tersebut, dana yang keluar serta dana yang masuk secara terorganisir secara lengkap dan jelas. Tujuan gereja pun sebagai media pertemuan jemaat dengan Tuhan dapat tetap berdiri teguh dan semakin berkembang, bukan saja bangunan gereja melainkan banyaknya jemaat yang melakukan peribadatan dalam gereja tersebut.

Gereja Kristen Jawi Wetan (GKJW) Kraksaan merupakan salah satu entitas nirlaba yang bergerak dibidang pelayanan peribadatan atau bidang keagamaan umat kristiani. Sebagai entitas nirlaba, GKJW Kraksaan berkewajiban melaporkan seluruh aktivitas pendanaan dalam gereja kepada pihak-pihak yang berkepentingan baik kepada seluruh jemaat gereja, maupun kepada pihak eksternal diluar gereja. Hal ini telah dibuktikan adanya pemberitahuan secara tertulis dalam buku tata tertib peribadatan gereja setiap minggu.

Informasi yang berisikan tentang penerimaan kas yang berasal dari persepuluhan, persembahan setiap minggu, sumbangan-sumbangan dan lain sebagainya. Tidak luput juga menerangkan tentang pengeluaran kas secara rutin, diantaranya percetakan kertas tata tertib ibadah, biaya perjalanan dinas pendeta, biaya gaji satpam dan lain sebagainya. Hal ini membuktikan bahwa GKJW Kraksaan sudah melakukan pencatatan serta pembukuan meskipun tidak sepenuhnya berdasarkan ketentuan yang tertulis dalam PSAK No. 45 tentang penyajian laporan keuangan entitas nirlaba.

Berdasarkan latarbelakang tersebut, penulis bertujuan untuk melakukan penelitian tentang Laporan Keuangan GKJW Kraksaan periode 2019, disertai dengan judul “**PENERAPAN PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN BERDASARKAN PSAK NO. 45 PADA GEREJA KRISTEN JAWI WETAN KRAKSAAN**”. Dengan judul tersebut, diharapkan dapat membantu pihak gereja dalam melakukan penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK No. 45 yang berlaku, supaya terlaksananya pelaporan keuangan yang transparan serta akuntabilitas.

1.2 Tujuan Laporan Tugas Akhir

Melalui penjelasan latar belakang di atas, tujuan studi lapang yang diharapkan penulis adalah untuk mengetahui bagaimana Penerapan Penyajian Laporan Keuangan Entitas Nirlaba berdasarkan PSAK No. 45 pada Greja Kristen Jawi Wetan Kraksaan.

1.3 Manfaat Laporan Tugas Akhir

Penulisan laporan tugas akhir ini memiliki manfaat tertentu yang ingin dicapai yang dapat memberikan masukan kepada pihak-pihak terkait. Manfaat tersebut secara rinci terbagi ke dalam manfaat kebijakan, manfaat secara praktis serta manfaat secara teoritis.

- a) Manfaat secara kebijakan, laporan tugas akhir ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun anggaran serta pengambilan keputusan yang berkesuaian dengan tuntunan PSAK No. 45.
- b) Manfaat secara praktis laporan ini adalah dapat digunakan sebagai informasi tambahan bagi pembaca terutama mereka yang merupakan pemilik serta

pengelola entitas dalam pengembangan entitas terutama dalam penyajian laporan keuangan sesuai dengan PSAK No. 45.

- c) Manfaat secara teoritis, penulisan laporan tugas akhir dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan penyajian laporan keuangan sesuai PSAK No. 45 yang berlaku umum.

1.4 Ruang Lingkup Laporan Tugas Akhir

Ruang lingkup laporan tugas akhir ini mencakup penyertaan laporan keuangan periode 2019 dari entitas GKJW Kraksaan. Hal ini untuk menentukan serta menilai penyajian laporan keuangan apakah sesuai dengan PSAK No. 45.

1.5 Metode Pengumpulan Data

Dalam rangka penulisan laporan tugas akhir ini, pengumpulan data dilakukan melalui beberapa pendekatan. Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisir kesalahan informasi yang diharapkan. Oleh sebab itu, penulis menggunakan metode pengumpulan data yaitu observasi, wawancara serta dokumentasi.

- a) Observasi, dalam penulisan laporan tugas akhir ini dimaksudkan sebagai pengamatan data secara langsung. Penulis akan melakukan observasi terhadap Laporan Keuangan Gereja Kristen Jawi Wetan Kraksaan secara langsung.
- b) Wawancara, metode pengumpulan data dengan cara tanya-jawab secara langsung kepada pihak yang berkaitan. Untuk itu, penulis dalam hal ini akan melakukan wawancara kepada pihak yang bersangkutan mengenai Laporan Keuangan Gereja Kristen Jawi Wetan Kraksaan periode 2019.
- c) Dokumentasi, metode ini merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data atau dokumen yang mendukung penulisan tugas akhir ini.

Untuk hal ini penulis akan mendokumentasikan data-data Laporan Keuangan
Greja Kristen Jawi Wetan Kraksaan periode 2019.